

KATA PENGANTAR



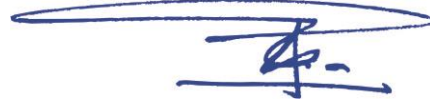
ANAK AGUNG GDE AGUNG, SH.
BUPATI BADUNG

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015, dapat disusun dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Perjanjian Kinerja ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja ini dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

Semoga Perjanjian Kinerja ini dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Badung.

MANGUPURA, 5 JANUARI 2015
BUPATI BADUNG



ANAK AGUNG GDE AGUNG

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1.LatarBelakang	1
1.2.Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung	1
BAB II Perjanjian Kinerja	5
2.1.Perencanaan Kinerja	5
2.2.1 Visi	6
2.2.2 Misi	7
2.2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	8
2.2 Perjanjian Kinerja	11
2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	12
2.4 Pelaksanaan Progam dan Anggaran Tahun 2015	16
BAB III Penutup	28

Lampiran Dokumen Review Penetapan Kinerja Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab desakan akan perbaikan kinerja instansi pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Selain Perencanaan yang strategis dan sinergis, setiap Pemerintah Daerah perlu menyusun target Kinerja sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai komitmen dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung dalam upaya membangun Badung yang *santhi* dan *jagadhita* berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung

Mengingat Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, maka struktur organisasi pemerintah daerah masih mengacu pada Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 14 tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sedangkan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Untuk dapat melaksanakan urusan tersebut dibentuk organisasi perangkat daerah. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung , terdiri dari :

1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretariat Daerah;
3. Tiga Asisten Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membidangi :
 - Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
 - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Hukum dan HAM
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membidangi :
 - Bagian Administrasi Pembangunan
 - Bagian Administrasi Perekonomian
 - c. Asisten Administrasi Umum membidangi :
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Umum
 - Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah
 - Bagian Humas dan Protokol
 - Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
4. Lima Staf Ahli terdiri dari :
 - Bidang Hukum dan Politik;
 - Bidang Pemerintahan;
 - Bidang Pembangunan;
 - Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - Bidang Ekonomi dan Keuangan;
5. Lima belas Dinas Daerah terdiri dari :
 - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;

- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Dinas Kebudayaan;
- Dinas Pariwisata;
- Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- Dinas Cipta Karya;
- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung;
- Dinas Pemadam Kebakaran;
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

6. Sebelas Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
- Badan Lingkungan Hidup;
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
- Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Satuan Polisi Pamong Praja;
- Kantor Perpustakaan Daerah;
- Kantor Arsip Daerah;
- Kantor Pemberdayaan Perempuan;
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

8. Inspektorat

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

10.6 Kecamatan terdiri dari :

- Kecamatan Petang;
- Kecamatan Abiansemal;
- Kecamatan Mengwi;
- Kecamatan Kuta Utara;
- Kecamatan Kuta;

- Kecamatan Kuta Selatan;

11. Serta 16 Kelurahan terdiri dari : Kelurahan Sempidi, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Kapal, Kelurahan Abianbase, Kelurahan Sading, Kelurahan Kerobokan, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kelurahan Tuban, Kelurahan Kedonganan, Kelurahan Kuta, Kelurahan Legian, Kelurahan Seminyak, Kelurahan Benoa, Kelurahan Tanjung Benoa, Kelurahan Jimbaran.
- 12.47 Desa Dinas terdiri dari : Desa Pecatu, Ungasan, Kutuh, Cunggu, Dalung, Tibubebeng, Buduk, Sobangan, Baha, Werdhi Bhuana, Mengwitani, Penarungan, Gulingan, Kekeran, Munggu, Sembung, Tumbak Bayuh, Pererenan, Cemagi, Mengwi, Kuwum, Darmasaba, Ayunan, Mambal, Abiansemal, Bongkasa, Punggul, Blahkiuh, Sangeh, Sibangkaja, Sibanggede, Angantaka, Sedang, Taman, Jagapati, Dauh Yeh Cani, Selat, Mekar Bhuana, Bongkasa Pertiwi, Belok Sidan, Carang Sari, Petang, Pelaga, Sulangai, Pangsan, Getasan.
- 13.2 Lembaga lain yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung yang dibentuk pada tanggal 21 Maret 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan di tuangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan

Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2014.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1. Visi

Sejalan dengan perkembangan era globalisasi, Kabupaten Badung menghadapi sejumlah permasalahan, tantangan dan atau ancaman yang sangat kompleks dengan berbagai dimensinya seperti : kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pelestarian budaya, pelestarian lingkungan dan kesenjangan pembangunan Badung Utara dan Badung Selatan. Oleh karenanya untuk membangun Badung yang lebih baik dimasa mendatang pada RPJMD Tahun 2010-2015 memberi prioritas pada upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, termasuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan yang hidup dalam masyarakat Badung, maka **visi** yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung adalah :



Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan berdasarkan falsafah TRI HITA KARANA.

2.1.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki untuk menuju Badung "Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita Berdasarkan TRI HITA KARANA", maka rumusan misi Kabupaten Badung dalam mencapai misi Badung 2013 ditetapkan dalam misi Pemerintah Kabupaten Badung dan sebagai pengejawantahan dari TRI HITA KARANA, yang dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu :

1. Fungsi Perhyangan:

1. Meningkatkan Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian.

2. Fungsi Pawongan:

2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung.
3. Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan.
5. Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman & ketertiban masyarakat.
6. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance & Clean Government*).

3. Fungsi Palemahan:

7. Memantapkan pelaksanaan otonomi Daerah.

8. Mewujudkan pembangunan yang selaras & seimbang sesuai fungsi wilayahnya.
9. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Untuk merealisasikan pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Badung, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Badung yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan serta menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sedangkan sasaran (Obyektif) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Badung, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Badung**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1	2	3
	Visi : Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita Berdasarkan TRI HITA KARANA	
	Misi ke-satu: Meningkatkan Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian.	
1.	Meningkatnya pelaksanaan Srada & Bhakti.	1. Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung

2.	Meningkatnya pelestarian Adat dan Budaya Bali.	2. Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras
Misi ke-dua: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung.		
3	Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 tahun.	3. Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.
4	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.	4. Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi.
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Di Kabupaten Badung.	5. Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita
		6. Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.
		7. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Misi ke-tiga: Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.		
6	Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu.	8. Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.
		9. Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung
7.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh masyarakat	10. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.

	miskin, cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.	
Misi ke-empat: Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan		
8.	Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan.	11. Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung
9.	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	12. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan
		13. Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan
Misi ke-lima: Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman & ketertiban masyarakat		
10.	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	14. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
		15. Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban
Misi ke –enam: Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance & Clean Government)		
11.	Terjaminnya terwujudnya <i>good government and clean government</i> .	16. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
		17. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel
Misi ke-tujuh: Memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah		
Misi ke-delapan: Mewujudkan pembangunan yang selaras & seimbang sesuai fungsi wilayahnya.		
12.	Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah.	18. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.

13.	Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah.	19. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang
		20. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.
Misi ke-sembilan: Melestarikan sumber daya alam & lingkungan hidup.		
14.	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	21. Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pemerintah Kabupaten Badung membuat perjanjian kinerja tahun 2015 mengacu pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010 – 2015 . Oleh karena itu Indikator-indikator

kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015 terlampir pada Dokumen ini.

2.3 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Pemerintah Kabupaten Badung yang telah mengalami revisi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Kabupaten Badung telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja utama dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir masa jabatan Bupati di tahun 2015. Indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Badung yang telah mengalami revisi guna mewujudkan kinerja yang lebih baik.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
1.	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung	1. Jumlah konflik SARA
2.	Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras	2. Persentase desa adat yang <i>memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)</i>
		3. Persentase sekaa teruna yang <i>memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)</i>
3.	Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.	4. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun
		5. Angka Melek Huruf

4.	Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi.	6. Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah
5.	Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita	7. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
		8. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
		9. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup
6.	Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.	10. Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO
		11. Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi
7.	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	12. Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri
		13. Cakupan desa siaga aktif
		14. Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga
8.	Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	15. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan
9.	Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung	16. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
10.	Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.	17. Persentase penurunan penyandang masalah sosial

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

11.	Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	18. Persentase koperasi sehat dan berkualitas
		19. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM
12.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	20. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan
		21. Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)
13.	Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan	22. Jumlah populasi peternakan
		23. Jumlah produksi perikanan dan kelautan
14.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	24. Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban
15.	Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	25. Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani
16.	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.	26. Opini Pemeriksaan BPK
		27. Peningkatan pendapatan asli daerah
17.	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel	28. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
18.	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.	29. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten
		30. Prosentase luas kawasan bebas banjir

19.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang	31. Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung
		32. Prosentase sarana prasarana gedung pemerintah yang representatif
20.	Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.	33. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)
		34. Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light
21.	Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.	35. Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air
		36. Persentase sumberdaya udara yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu
		37. Persentase perusahaan yang dibina yang menggunakan pengolahan limbah

2.4 PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2015

Pencapaian target pada indikator kinerja utama tak lepas dari program, kegiatan serta alokasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD di jajaran Pemerintahan Kabupaten Badung pada tahun 2015. Terdapat 62 program dan 394 kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Kabupaten Badung seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah Program dan Kegiatan serta Alokasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PROGAM	KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung	1. Jumlah konflik SARA		0	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	225.386.100
2.	Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras	2. Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	%	100	Pengembangan Nilai Budaya	3	553.118.200
		3. Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	%	100			
3.	Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.	4. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun	%	100	1. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 2. Pendidikan Menengah	191	127.199.186.461 4.630.040.015
		5. Angka Melek Huruf	%	100	Pendidikan Non Formal		1
4.	Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi.	6. Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah	%	100	Pendidikan Menengah	1	10.366.000.000
5.	Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita	7. Angka kematian ibu melahirkan per	kh	60/100.000	Program Peningkatan Kesehatan Ibu	8	1.074.249.200

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

		100.000 kelahiran hidup			Melahirkan dan anak		
		8. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	kh	4,5/1.000			
		9. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	kh	5/ 1.000	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	3	339.098.050
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3	379.751.000
6.	Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.	10. Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO	%	45	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1	629.868.500
		11. Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi	%	100	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	6.479.800
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1	37.464.100
7.	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	12. Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	%	95	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5	2.624.049.025
		13. Cakupan desa siaga aktif	%	100		1	
		14. Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat	%	70		2	

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

		rumah tangga					
8.	Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	15. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan: 1. Prosentase keluarga yang memiliki KK	%	100	Program Penataan Administrasi Kependudukan	14	692.625.350
		2. Prosentase penduduk yang memiliki KTP	%	100			
		3. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	%	100			
		4. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	%	100			

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

9.	Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung	16. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	0.12	Program Keluarga Berencana	1	40.78 5.600
10.	Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.	17. Persentase penurunan penyandang masalah sosial	%	67	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan PMKS. 2. Pelaksanaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 4. Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial 5. Peningkatan 	21	3.279 .105. 900

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

					Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		
11.	Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	18. Persentase koperasi sehat dan berkualitas	%	21.68	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	4	310.316.100
		19. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	US\$	120.152.926.503	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	9	994.402.100
12.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	20. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan	TON	174.450	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		24,521,223,850
					2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		284,352,100
					3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan		1,282,508,000
					4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan		759,346,850
					5. Program Pengembangan		6,577,850
						176,060,100	
						44,909,300	
						5,965,200	

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

					<p>Agribisnis</p> <p>6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</p> <p>8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</p> <p>9. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan</p>		
		21. Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)	KW/HA	64	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		2,203,333,300
13.	Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan	22. Jumlah populasi peternakan	Ekor	1.450.000	<p>1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;</p> <p>2. Program Peningkatan produksi hasil peternakan</p> <p>3. Program peningkatan pemasaran</p>	16	5.020.930.974

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

					anhasil produksi peternakan 4. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan		
		23. Jumlah produksi perikanan dan kelautan	Ton	157.556,05	1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; 2. Program pemberdayaan dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan ; 3. Program pengembangan budidaya perikanan; 4. Program Pengembangan perikanan tangkap ; 5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;	18	27.992.931.447

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

					<p>6. Program Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan ;</p> <p>7. Program Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan;</p> <p>8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap ;</p> <p>9. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil</p>		
14.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	24. Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	Pelanggaran	2.500	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	242.835.800
15.	Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	25. Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun	%	75	Program pemeliharaan kankamtribmas dan pencegahan tindak kriminal	1	13.666.350

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

		waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima					
16.	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.	26. Opini Pemeriksaan BPK	Opini	wtp	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	907.259.225
		27. Peningkatan pendapatan asli daerah	Rp	2.302.169.811	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19 1	2.152.878.600 10.287.400
17.	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan	28. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	70	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6	312.977.000

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

	pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel						
18.	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.	29. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Dokumen	3	Program Perencanaan Tata Ruang	3	1.02 3.60 2.20 0
		30. Prosentase Jaringan irigasi berkondisi baik	%	94.68	1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan pengairan lainnya	38	127.0 50.68 6.425
19.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang	31. Prosentase lahan terbangunan sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	%	60	1. Program Pengendalian pemanfaatan ruang	1	244. 722. 500
		32. Prosentase sarana prasarana gedung pemerintah yang representatif	%	43	1. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 2. Penataan Bangunan Gedung	12	511. 054. 500 92.1 97.8 43.7 86
20.	Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan	33. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)	(V/C ratio)	0.60	2. Program peningkatan pelayanan angkutan 3. Program Pembangunan	1	59.1 49.5 00

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

	program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.				Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		
		34. Persentase persimpangan yang terpasang traffic light	%	78.43	4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2	1.70 9.20 2.70 0
21.	Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.	35. Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air: • COD air sungai	mg/lt	50	Program pengendalian dan perusakan lingkungan	1	20.1 92.6 00
		• BOD air sungai	mg/lt	6			
		• BOD air laut	mg/lt	10			
		36. Persentase sumberdaya udara yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu	µg/m ³	400	Program Sumber Daya Alam	1	52.6 54.9 00
		37. Persentase perusahaan yang dibina yang menggunakan pengolahan limbah	Perusahaan	80	Program Sumber Daya Alam	1	20.0 65.9 50

BAB III PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung ini berisikan program /kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja . Perjanjian kinerja ini dibuat sebagai wujud komitmen untuk mencapai target kinerja yang harus diwujudkan tahun 2015 dan akan dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian pemerintah atasan , sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan demikian Dokumen Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistimatis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Demikian penetapan kinerja Kabupaten Badung dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BADUNG



ANAK AGUNG GDE AGUNG

BUPATI BADUNG



PERJANJIAN

KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anak Agung Gde Agung

Jabatan : Bupati Badung

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mangupura, 5 Januari 2015

BUPATI BADUNG

ANAK AGUNG GDE AGUNG

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung	38. Jumlah konflik SARA		0
2.	Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras	39. Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	%	100
		40. Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	%	100
3.	Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.	41. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun	%	100
		42. Angka Melek Huruf	%	100
4.	Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi.	43. Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah	%	100
5.	Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita	44. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	kh	60/ 100.000
		45. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	kh	4,5/ 1.000

		46. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	kh	5/ 1.000
6.	Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.	47. Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO	%	45
		48. Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi	%	100
7.	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	49. Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	%	95
		50. Cakupan desa siaga aktif	%	100
		51. Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga	%	70
8.	Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	52. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan:	%	100
		5. Prosentase keluarga yang memiliki KK		
		6. Prosentase penduduk yang memiliki KTP	%	100
		7. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	%	100
		8. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	%	100

9.	Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung	53. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	0.12
10.	Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.	54. Persentase penurunan penyandang masalah sosial	%	67
11.	Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	55. Persentase koperasi sehat dan berkualitas	%	21.68
		56. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	US\$	120.152.926.503
12.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	57. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan	TON	174.450
		58. Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)	KW/HA	64
13.	Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan	59. Jumlah populasi peternakan	Ekor	1.450.000
		60. Jumlah produksi perikanan dan kelautan	Ton	157.556,05
14.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	61. Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	Pelanggaran	2.500

15.	Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	62. Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima	%	75
16.	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.	63. Opini Pemeriksaan BPK	Opini	wtp
		64. Peningkatan pendapatan asli daerah	Rp	2.302.169.811
17.	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel	65. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	70
18.	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.	66. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Dokumen	3
		67. Prosentase Jaringan irigasi berondisi baik	%	94.68
19.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk	68. Prosentase lahan terbangun sesuai	%	60

	membangun sesuai dengan rencana tata ruang	dengan RTRW Kabupaten Badung		
		69. Prosentase sarana prasarana gedung pemerintah yang representatif	%	43
20.	Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.	70. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)	(V/C ratio)	0.60
		71. Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light	%	78.43
21	Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.	72. Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air:	mg/lt	50
		• COD air sungai		
		• BOD air sungai	mg/lt	6
		• BOD air laut	mg/lt	10
		73. Persentase sumberdaya udara yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	400
		74. Persentase perusahaan yang dibina yang menggunakan pengolahan limbah	Perusahaan	80

PROGAM	PAGU
1. Program Pengembangan Nilai Budaya	225.386.100
2. Pengembangan Nilai Budaya	553.118.200
3. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	127.199.186.461
4. Pendidikan Menengah	4.630.040.015
5. Pendidikan Non Formal	517.478.100
6. Pendidikan Menengah	10.366.000.000
7. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan anak	1.074.249.200
8. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	339.098.050
9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	379.751.000
10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	629.868.500
11. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	6.479.800
12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	37.464.100
13. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2.624.049.025
14. Program Penataan Administrasi Kependudukan	692.625.350
15. Program Keluarga Berencana	40.785.600
16. Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan PMKS.	3.279.105.900
17. Pelaksanaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
18. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	
19. Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial	
20. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
21. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	310.316.100

22. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	994.402.100
23. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	24,521,223,850
24. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	284,352,100
25. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1,282,508,000
26. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	759,346,850
27. Program Pengembangan Agribisnis	6,577,850
28. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	176,060,100
29. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	44,909,300
30. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	5,965,200
31. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2,203,333,300
32. Program pencegahan dan penang-gulangan penyakit ternak;	5.020.930.974
33. Program Peningkatan produksi hasilpeternakan	
34. Program peningkatan pemasaranhasil produksi peternakan	
35. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	
36. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;	27.992.931.447
37. Program pemberdayaan dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan;	
38. Program pengembangan budidaya perikanan;	
39. Program Pengembangan perikanan tangkap;	
40. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;	

41. Program Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan;	
42. Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;	
43. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap;	
44. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	
45. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	242.835.800
46. Program pemeliharaan kankamtribmas dan pencegahan tindak kriminal	13.666.350
47. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	907.259.225
48. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.152.878.600
49. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.287.400
50. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	312.977.000
51. Program Perencanaan Tata Ruang	1.023.602.200
52. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan pengairan lainnya	127.050.686.425
53. Program Pengendalian pemanfaatan ruang	244.722.500
54. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	511.054.500
55. Penataan Bangunan Gedung	92.197.843.786
56. Program peningkatan pelayanan angkutan	59.149.500
57. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
58. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.709.202.700

59. Program pengendalian dan perusakan lingkungan	20.192.600
60. Program Sumber Daya Alam	52.654.900
61. Program Sumber Daya Alam	20.065.950

BUPATI BADUNG



ANAK AGUNG GDE AGUNG